

Menuju Pemolisian Humanis: Sintesis Realitas Tugas Kepolisian Melalui Media Visual “Komik Polisi”

Hasby Ristama
Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya

E-mail: hasby07.ristama@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi pemolisian humanis melalui media visual “Komik Polisi” sebagai strategi transformasi Polri Presisi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis semiotika Roland Barthes, penelitian ini membedah bagaimana elemen estetika merekonstruksi figur polisi dari kesan militeristik menjadi pelindung yang empatik melalui penggunaan garis gambar luwes dan narasi humanis. Integrasi antara pemolisian komunitas dan pemolisian seni dalam media ini terbukti efektif menjembatani hambatan komunikasi dengan masyarakat urban, khususnya generasi muda. Temuan menunjukkan respon publik di akun @komikpolisi yang mayoritas positif dengan lebih dari 100.000 pengikut, mengonfirmasi bahwa diplomasi visual melalui komik mampu meningkatkan persepsi keadilan prosedural. Kesimpulannya, media visual komik berfungsi sebagai instrumen strategis untuk merawat keteraturan sosial secara partisipatif sekaligus memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Kata kunci : *Humanis; Komik Polisi; Pemolisian Komunitas; Pemolisian Seni; Polri*

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of humanist policing through the visual media "Komik Polisi" as a transformation strategy for the Polri Presisi. Using a qualitative approach with Roland Barthes' semiotic analysis, this study dissects how aesthetic elements reconstruct the police figure from a militaristic impression to an empathetic protector through the use of flexible drawing lines and humanist narratives. The integration of community policing and art policing in this media has proven effective in bridging communication barriers with urban communities, especially the younger generation. The findings show a mostly positive public response in @komikpolisi with more than 100,000 followers, confirming that visual diplomacy through comics can improve the perception of procedural justice. In conclusion, the visual media of comics functions as a strategic instrument to maintain social order in a participatory manner while strengthening the legitimacy and public trust in the National Police institution.

Keyword : *Humanist; Komik Polisi; Community Policing; Art Policing; Polri*

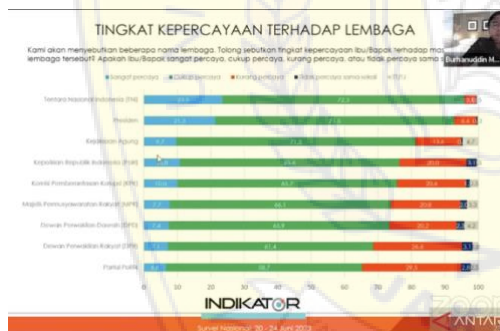
1. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saat ini tengah berada

pada fase transformasi fundamental menuju paradigma pemolisian yang lebih modern dan beradab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

fungsi kepolisian tidak sekadar penegakan hukum, melainkan juga perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, tantangan di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara prosedur formal dengan persepsi keadilan di masyarakat. Hal inilah yang mendorong urgensi penguatan konsep "Pemolisian Humanis" sebagai wujud manifestasi dari semangat Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

Data dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan dinamika tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang fluktuatif. Setelah sempat mengalami penurunan signifikan pada pertengahan 2022, kepercayaan publik kembali menguat hingga mencapai angka 76,4% pada akhir 2023 dan terus diupayakan stabil di tahun 2024 (Indikator Politik Indonesia, 2024).



Gambar 1 Hasil Survei Tingkat Kepercayaan Terhadap Lembaga Tahun 2023

(Sumber: Indikator Politik Indonesia, 2023)

Penguatan ini didorong oleh pendekatan yang lebih empatik dan transparan. Pemolisian humanis menempatkan polisi bukan sebagai “warrior” (pejuang yang konfrontatif), melainkan sebagai “guardian” (pelindung) yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan (Tyler, 2006).

Salah satu kendala utama dalam implementasi pemolisian humanis adalah hambatan komunikasi dan stigma otoritarianisme yang kerap masih melekat

pada institusi Polri. Di sisi lain, masyarakat, terutama generasi muda, cenderung menghindari informasi yang bersifat instruktif dan kaku. Oleh karena itu, diperlukan media komunikasi alternatif yang mampu mendiseminasikan nilai-nilai kemanusiaan kepolisian secara lebih ringan dan inklusif. Media visual, khususnya komik, memiliki kekuatan naratif yang mampu menyederhanakan kompleksitas hukum menjadi pesan yang menyentuh sisi emosional pembaca (Eisner, 2008).

Penggunaan “Komik Polisi” (@komikpolisi) sebagai instrumen sosialisasi bukan sekadar upaya hiburan, melainkan sebuah strategi literasi hukum visual. Melalui komik, personifikasi anggota Polri dapat ditampilkan lebih humanis, memiliki empati, dapat melakukan kesalahan, namun tetap berintegritas. Hal ini sejalan dengan teori keadilan prosedural yang menyatakan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum lebih ditentukan oleh bagaimana mereka diperlakukan secara terhormat oleh aparat (Mazerolle et al., 2013).

Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, dengan karakteristik masyarakat urban yang memiliki tingkat konsumsi media digital yang tinggi, penggunaan komik sebagai media edukasi menjadi sangat relevan. Komik mampu menjembatani *communication gap* dan membangun citra Polri yang lebih hangat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media visual “Komik Polisi” mampu mentransformasikan nilai-nilai pemolisian humanis ke dalam pemahaman kolektif masyarakat, sekaligus memperkuat legitimasi Polri di ruang publik.

2. LANDASAN TEORI

Community policing atau pemolisian masyarakat (Polmas) merupakan paradigma yang menekankan pada kemitraan antara polisi dan warga

dalam memecahkan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurut Trojanowicz (1998), pemolisian masyarakat adalah filosofi yang memungkinkan polisi dan masyarakat bekerja sama dengan cara-cara baru yang kreatif untuk menyelesaikan permasalahan sosial.

Dalam konteks urban seperti di wilayah hukum Polda Metro Jaya, paradigma polmas menuntut polisi untuk “hadir” secara psikologis dan emosional, tidak hanya secara fisik. Strategi ini mensyaratkan adanya komunikasi dua arah yang setara, di mana polisi mampu menyerap aspirasi warga tanpa adanya sekat formalitas yang kaku (Goldstein, 1987).

Selain polmas, teori *art policing* merupakan konsep inovatif yang dikembangkan dalam lingkungan Lemdiklat Polri untuk melakukan pendekatan kepolisian melalui aspek seni dan budaya. Paradigma *art policing* menempatkan anggota polisi tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai “*seniman*” dalam mengelola keteraturan sosial (Chryshnanda, 2021).

Pendekatan ini memandang bahwa seni memiliki kekuatan untuk melembutkan watak, membangun empati, dan menyampaikan pesan-pesan moral tanpa kesan menggurui. Oleh karena itu, *art policing* bertujuan untuk:

1. Menghilangkan kesan sangar dan menakutkan pada sosok polisi (humanisasi instansi).
2. Menyampaikan nilai-nilai kepatuhan hukum melalui media yang menyenangkan (edukasi estetis).
3. Menggunakan pendekatan budaya untuk meredam ketegangan di masyarakat (*resolusi konflik*)

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik topik penelitian yang

memerlukan pemahaman mendalam mengenai fenomena pemolisian humanis dalam medium seni visual (Creswell & Poth, 2018). Peneliti ingin mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai *community policing* dan *art policing* dikonstruksikan melalui visualisasi “Komik Polisi”. Sumber data penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada konten digital yang dipublikasikan melalui @komikpolisi sebagai representasi strategi komunikasi visual kepolisian urban.

Objek utama penelitian ini adalah materi visual “Komik Polisi” yang memuat pesan-pesan pelayanan, empati, dan penegakan hukum yang humanis. Data dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari tim kreatif pembuat konten (*content creator* “Komik Polisi”) untuk memahami intensi pesan serta perwakilan masyarakat (*netizen*) untuk melihat efektivitas penerimaan pesan (Sugiyono, 2013).

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yakni 1) Mengumpulkan arsip digital “Komik Polisi” yang telah dipublikasikan di media sosial resmi kepolisian untuk dianalisis secara visual, 2) Mengamati interaksi, komentar, dan respon publik terhadap unggahan komik tersebut guna mengukur sejauh mana pesan humanis diterima oleh masyarakat (Kozinets, 2015), dan 3) Melakukan diskusi terarah dengan praktisi kepolisian terkait implementasi konsep *art policing* dalam media komik.

Selain analisis naratif, penelitian ini juga menerapkan teknik analisis semiotika model Roland Barthes untuk membedah tanda-tanda visual dalam “Komik Polisi”. Analisis ini dilakukan melalui tiga tingkatan signifikasi, yaitu:

1. Denotasi atau pemaknaan harfiah untuk mengidentifikasi gambaran literal dalam panel komik seperti seragam, ekspresi wajah, dan gestur anggota Polri;

2. Konotasi atau pemaknaan budaya untuk mengungkap makna emosional dan ideologis di balik visual tersebut, misalnya bagaimana gestur membungkuk anggota Polri dikonotasikan sebagai bentuk kerendahan hati dan pelayanan humanis;
3. Citra atau pemaknaan hakikat untuk menganalisis bagaimana tanda-tanda tersebut pada akhirnya membentuk citra kolektif polisi sebagai “*Guardian of Civilization*” di mata masyarakat (Barthes, 1977).

Sehingga, pendekatan semiotika, yang dilakukan peneliti dapat mengungkap bagaimana elemen estetika dalam “Komik Polisi” secara sistematis mentransformasikan identitas Polri dari kesan *paramilitary policing* menjadi figur yang lebih empatik dan aksesibel sejalan dengan perpaduan prinsip *community policing* dan *art policing*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Rekonstruksi Visual Figur Polri

Berdasarkan hasil observasi terhadap beberapa sampel panel “Komik Polisi” yang dipublikasikan oleh Polda Metro Jaya, ditemukan adanya upaya rekonstruksi visual yang sistematis terhadap figur anggota Polri.



**Gambar 2 Hasil Tangkap Layar
@komikpolisi**

(Sumber: Akun Instagram @komikpolisi, 2025)

Secara literal, karakter polisi dalam komik digambarkan menggunakan seragam dinas yang rapi namun dengan garis gambar (*line art*) yang cenderung bulat (*rounded*) dan luwes, bukan garis tajam yang kaku. Ekspresi wajah dominan adalah tersenyum (kontak mata positif) dengan gestur tubuh yang condong ke arah masyarakat (subjek).

Dominasi penggunaan garis yang luwes dan ekspresi ramah tersebut mengafirmasikan aspek keterbukaan (*approachability*) dan keramahan. Hal ini bertujuan untuk mereduksi kesan militeristik dan otoriter yang selama ini menjadi barikade psikologis antara Polri dan warga. Gestur membungkuk atau menyejajarkan posisi duduk dengan warga dalam panel komik merupakan tanda konotatif dari “pelayan masyarakat” yang menghargai martabat individu (Tyler, 2006).



**Gambar 3 Hasil Tangkap Layar
@komikpolisi**

(Sumber: Akun Instagram @komikpolisi, 2025)

Secara keseluruhan, visualisasi dalam akun @komikpolisi membangun citra bahwa Polri adalah “sahabat Masyarakat”. Citra ini diperlukan untuk menggantikan persepsi lama tentang polisi sebagai alat kekuasaan, menjadi polisi sebagai instrumen peradaban yang humanis.

4.2 Digitalisasi *Community Policing* dalam *Art Policing* melalui Partisipasi Publik

Hasil analisis netnografi pada kolom komentar unggahan akun @komikpoliri menunjukkan respon publik yang mayoritas positif. Sentimen masyarakat cenderung lebih lunak ketika menerima edukasi melalui media komik dibandingkan melalui rilis pers formal. Partisipasi publik dalam bentuk *like*, *share*, dan komentar diskusi menunjukkan bahwa hambatan komunikasi mulai terkikis. Bukti nyata partisipasi publik terhadap akun @komikpoliri juga nampak dari jumlah pengikut (*followers*) yang lebih dari 100.000 dengan jumlah postingan mencapai 7.784.



Gambar 4 Hasil Tangkap Homepage Akun @komikpolisi

(Sumber: Akun Instagram @komikpolisi, 2025)

Fenomena ini membuktikan bahwa pemolisian masyarakat (*community policing*) di era digital tidak lagi hanya dilakukan melalui patroli fisik, tetapi juga melalui “patroli visual” di media sosial. “Komik Polisi” sebagai wujud *art policing* menjadi ruang pertemuan virtual antara polisi dan masyarakat urban yang sibuk. Dengan demikian, legitimasi kepolisian diperkuat melalui persepsi keadilan prosedural yang ditampilkan secara konsisten dalam narasi-narasi visual tersebut (Mazerolle et al., 2013).

4.3 Implementasi *Art Policing* dalam Pesan Kamtibmas

Melalui pendekatan *art policing*, “Komik Polisi” berfungsi sebagai media edukasi estetis yang efektif. Dalam salah

satu skenario komik mengenai penanganan konflik ringan antarwarga, karakter Polri tidak ditampilkan melakukan tindakan represif. Sebaliknya, polisi digambarkan sebagai fasilitator melalui mekanisme *restorative justice*.

Seni visual dalam “Komik Polisi” memungkinkan pesan-pesan yang bersifat instruktif (seperti larangan atau himbauan hukum) disampaikan secara halus melalui alur cerita (*storytelling*). Sebagaimana ditegaskan oleh Chryshnanda (2021), *art policing* seyogyanya salah satu cara polisi merawat keteraturan tanpa harus melukai. Penggunaan warna-warna yang menyejukkan (seperti biru muda dan putih) dalam latar belakang komik secara psikologis memberikan kesan tenang dan aman bagi penikmatnya, yang merupakan manifestasi dari fungsi pengayoman Polri.



Gambar 5 Diseminasi “Komik Polisi”
(Sumber: Liputan6.com, 2021)

4.4 Instrumentasi Humanitarian Kepolisian

Integrasi antara aspek estetika (seni) dan fungsi kepolisian (pelayanan) menciptakan sebuah model pemolisian yang lebih “berperasaan”. “Komik Polisi” terbukti mampu menyederhanakan kompleksitas birokrasi dan hukum menjadi nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Hal ini sejalan dengan tujuan utama transformasi Polri Presisi, yakni mewujudkan institusi yang tidak hanya hebat dalam penegakan hukum, tetapi juga dicintai karena sisi kemanusiaannya.

Dalam hal ini, “Komik Polisi” menjadi instrumen *art policing* yang sangat relevan karena menggabungkan elemen naratif, visual, dan estetika untuk menciptakan “sentuhan kemanusiaan”

dalam penegakan hukum (Lemdiklat Polri, 2023).

Integrasi antara *community policing* dan *art policing* melalui media “Komik Polisi” menciptakan sebuah model komunikasi yang disebut sebagai “diplomasi visual”. Komik memungkinkan pesan-pesan pemolisian humanis, seperti kejujuran, pelayanan prima, dan empati, dikemas dalam karakter-karakter yang *relatable* bagi masyarakat. Sejalan dengan teori *art policing*, maka penggunaan visual yang menarik dapat menurunkan tingkat resistensi publik terhadap otoritas polisi (Loader, 1997). Dengan demikian, “Komik Polisi” berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan visi strategis Polri dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari, sekaligus menjadi sarana untuk merawat peradaban dan keteraturan sosial secara partisipatif.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini merumuskan kesimpulan atas dasar 3 aspek. Kesimpulan pertama yakni Penggunaan “Komik Polisi” merupakan bentuk diplomasi visual yang efektif dalam mentransformasikan citra kepolisian dari figur otoriter menjadi figur *guardian* (pelindung) yang humanis. Secara semiotik, elemen visual dalam komik berhasil merekonstruksi stigma negatif dan mendekatkan polisi dengan realitas sosial masyarakat urban. Kemudian, implementasi pemolisian humanis melalui komik merupakan wujud nyata dari strategi *community policing* dan *art policing*. Media ini mampu merawat keteraturan sosial tanpa melalui jalur kekerasan, melainkan melalui edukasi estetis dan narasi yang empatik. Dan terakhir, pemanfaatan media kreatif di ruang digital terbukti mampu meningkatkan persepsi keadilan prosedural di mata masyarakat. Dengan

menyajikan sisi kemanusiaan anggota Polri, maka jurang komunikasi dapat diminimalisir, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi Polri, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barthes, R. (1977). *Image, Music, Text*. Hammersmith: Fontana Press.
- Budiman, K. (2011). *Semiotika Visual: Konsep, Isu, dan Problem*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Chryshnanda, D. L. (2021). *Art Policing: Pemolisian dengan Pendekatan Seni Budaya*. Jakarta: YPKIK.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Los Angeles: Sage Publications.
- Eisner, W. (2008). *Graphic Storytelling And Visual Narrative: Principles and Practices from the Legendary Cartoonist*. New York: W. W. Norton & Company.
- Goldstein, H. (1987). Toward Community-Oriented Policing: Potential, Basic Requirements, And Threshold Questions. *Crime & Delinquency*, 33(1), 6–30.
- Indikator Politik Indonesia. (2024). *Persepsi Publik Terhadap Kinerja Lembaga Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi*. Laporan Survei Nasional.
- Investigasi Bhayangkara Indonesia. (6 Juli 2023). *Lomba Komik Polisi, Bentuk Humanisme Kepolisian Kepada Masyarakat*. Diakses dari <https://investigasibhayangkara.com/lomba-komik-polisi-bentuk-humanisme-kepolisian-kepada-masyarakat/>
- Jauregui, B. (2013). *Dirty Anthropology: Epistemologies of Violence and Ethical Entanglements in Police*

- Ethnography. In W. Garriott (Ed.), *Policing and Contemporary Governance* (pp. 125-153). New York: Palgrave Macmillan.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009). Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kozinets, R. V. (2015). *Netnography: Redefined*. London: Sage Publications.
- Kunarto. (1997). *Etika Lepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Lemdiklat Polri. (2023). *Lemdiklat Polri Mengajarkan Art Policing Untuk Merawat Keteraturan Sosial*. Diakses dari <https://lemdiklat.polri.go.id/web/lemdiklat-polri-mengajarkan-art-policing-untuk-merawat-keteraturan-sosial>.
- Saputra, Aditia. (28 November 2021). *Miliki Ratusan Ribu Followers, Komik Polisi Membawa Semangat Positif Kesenian Indonesia*. Diakses dari https://www.liputan6.com/showbiz/read/4722638/miliki-ratusan-ribu-followers-komik-polisi-membawa-semangat-positif-kesenian-indonesia#google_vignette.
- Loader, I. (1997). Policing And The Social: Questions Of Symbolic Power. *The British Journal of Sociology*, 48(1), 1–18.
- Mazerolle, L., Bennett, S., Davis, J., Sargeant, E., & Manning, M. (2013). Procedural Justice And Police Legitimacy: A Systematic Review Of The Research Evidence. *Journal of Experimental Criminology*, 9(3), 245–274. <https://doi.org/10.1007/s11292-013-9175-2>.
- Media Indonesia. (29 November 2021). *Didik Masyarakat secara Humanis, Polisi Rutin Gelar Lomba Komik*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/megapolitan/450314/didik-masyarakat-secara-humanis-polisi-rutin-gelar-lomba-komik>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. (3rd Ed.). California: Sage Publications.
- Rahardjo, Satjipto. (2005). Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 1 April 2005.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Trojanowicz, R. C. (1998). *Community Policing: A Contemporary Perspective*. Cincinnati: Anderson Publishing Company.
- Tyler, T. R. (2006). *Why People Obey The Law*. Princeton: Princeton University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.